

SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN MAMUJU**

*THE EFFECT OF PERFORMANCE-BASED BUDGET ON PERFORMANCE
ACCOUNTABILITY OF REGIONAL WATER DRINKING COMPANIES
(PDAM) IN MAMUJU DISTRICT*



Oleh

RINRI ANI

C02 18 036

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2023

ABSTRAK

RINRI ANI, 2023. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju. Dibimbing oleh Taufik Hidayat B Tahawa dan Sufyan Amirullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja perusahaan daerah air minum di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju. Objek yang diteliti adalah pegawai yang bekerja pada PDAM Kabupaten Mamuju. Instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner. Sampel sebanyak 53 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah uji hipotesis secara parsial dan regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Perusahaan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan mendasar seseorang yang menunjang kebutuhan kelangsungan hidupnya. Air dapat diambil langsung dari lingkungan atau melalui sumber yang dikendalikan oleh orang lain, seperti air dalam kemasan atau PDAM. Ketersediaan air harus senantiasa dikelola secara cermat karena merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi umat manusia.

Air merupakan kebutuhan hidup manusia dan mempengaruhi kepentingan banyak orang, sehingga pengelolaannya tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah negara kita telah menugaskan PDAM untuk mengelola sumber daya air. PDAM adalah perusahaan yang menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan aktivitas bisnis yang berorientasi pada laba secara bersamaan. Jika orientasi keuntungan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebagai dana operasional dan sebagai sumber pendapatan daerah, orientasi sosial berfokus pada penyediaan air bersih untuk pelanggan.

Sebagaimana diketahui, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain mendorong kegiatan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, memberikan pelayanan sosial, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Wahyudin dan Muryati (2021), kontribusi usaha daerah berupa bagi hasil, yang disetorkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dan digunakan sebagai pendanaan inisiatif pembangunan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelola PDAM harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan simpanan PAD yang dapat digunakan untuk mendanai pembayaran kepada pemerintah daerah. Untuk mewujudkan efisiensi, tujuan tersebut dicapai dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, infrastruktur produksi dan distribusi, penanganan pelanggan, dan pemanfaatan kemajuan teknologi pengelolaan air.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), unit usaha yang dikendalikan oleh daerah, menyediakan air bersih untuk penduduk setempat. sebuah usaha yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dibentuk oleh pemerintah daerah. Salah satu ukuran keberhasilan keuangan PDAM, sebagai salah satu bisnis daerah yang ingin memperkuatnya, adalah jumlah laba yang dihasilkannya setiap periode dan kemampuannya untuk melunasi utang jangka pendeknya.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM-TM) merupakan salah satu badan usaha daerah di Kabupaten Mamuju. Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang diubah namanya menjadi PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pendiriannya disahkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 064/KPTS/CK/1982, tanggal 10 Mei 1982. BPAM merupakan lembaga yang pengelolaannya berada di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum.

Seiring dengan perkembangan BPAM Kabupaten Mamuju pada saat itu hingga memasuki Tahun 1993, maka sebagai imbas dari pelaksanaan ketentuan otonomi daerah, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 72/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

dibeberapa Kabupaten termasuk Kabupaten Mamuju kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten, maka sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri tersebut, sambil menunggu pengesahan pendirian PDAM dibentuklah Badan Pengelolaan Air Minum Daerah (BPAMD) Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamuju Nomor : 006/III/1993, tanggal 31 Maret 1993.

Setelah melalui suatu proses, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati. II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 BPAMD Kabupaten Mamuju dirubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Mamuju yang merupakan suatu lembaga otonomi yang terpisah dari Pemerintah Daerah dengan Badan Hukumnya. Perusahaan ini bergerak dalam Pelayanan Jasa Publik Sektor Air Minum dengan fungsi ganda disamping orientasi bisnis juga tidak mengabaikan fungsi sosialnya dalam pelayanan air bersih atau air minum, dengan prinsip 3 K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) sesuai standard kesehatan yang ditetapkan.

Dalam operasionalnya, PDAM memiliki beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam proses pencapaian akuntabilitas keuangan PT. PDAM. Adapun kendala tersebut antara lain terangkum dalam aspek Keuangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat cakupan pelayanan yang masih rendah, kinerja yang masih rendah, menurunnya potensi sumber daya air baku pada saat kemarau, dan masih tingginya tunggakan pembayaran pelanggan.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, perlu disusun tujuan, sasaran serta indikator keberhasilan yang dirampungkan dalam bentuk rencana strategik. Indikator keberhasilan merupakan alat ukur yang harus dievaluasi secara periodik serta berkesinambungan. Selanjutnya dijadikan bahan untuk mengendalikan arah dan mutu pelayanan agar tujuan serta indikator yang telah ditetapkan benar-benar dapat diwujudkan.

Masalah yang besar dalam pengelolaan keuangan instansi sektor publik yaitu anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam hal ini, suatu unit organisasi sektor publik harus menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Karena anggaran mempunyai kedudukan penting, maka suatu unit organisasi sektor publik harus mencatat anggaran dan melaporkan realisasi. Dan nantinya hasil yang diperoleh akan dapat dibandingkan, serta dapat melakukan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari anggaran. Anggaran juga diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang baik, untuk menciptakan kinerja yang baik.

Anggaran Berbasis Kinerja adalah suatu penyusunan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Djayasinga, 2015). Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu

program atau kegiatan pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor yaitu kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan penghargaan dan hukuman. Anggaran berbasis kinerja yang baik oleh pemerintah atau perusahaan daerah dan pengawasannya yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau perusahaan daerah sehingga kinerja penyelenggaraannya dapat optimal (Laura. dkk, 2016).

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengkaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang dihasilkan. Manfaat tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Kebijakan sistem penganggaran lingkup publik telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan ini telah membawa banyak perubahan pada sistem penganggaran publik di Indonesia. Perubahan ini

dikarenakan banyaknya anggaran yang tidak terserap dengan baik sehingga tidak bersifat ekonomis dan efisien dalam pelaksanaannya. Karena kurangnya informasi yang memadai bagi pengambil keputusan, didasarkan pada manajemen dan kurang diperhatikanya pada proses perencanaan dan evaluasi.

Perubahan anggaran ke berbasis kinerja ini meningkatkan sistem penganggaran konvensional. Dalam penganggaran ini diterapkan konsepsi *value for money*, seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas, yang tidak melekat pada sistem anggaran lama. Kenyataannya, sistem penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara optimal dan masih banyak hambatan di daerah ini. Suryanto dan *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan *good governance*.

Pada tahun 2021 terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerusakan pada PDAM Kabupaten Mamuju yaitu bencana gempa bumi. Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah yang tertimpa bencana gempa bumi yang berkekuatan 6,2 SR di provinsi Sulawesi Barat memiliki kerusakan yang tinggi pada tahun 2021. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada kawasan tempat tinggal penduduk dan perkantoran hingga bangunan yang tinggi dan bertingkat. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada Sarana dan Prasarana (Sarpras) PDAM Kabupaten Mamuju.

Gempa berskala 6,2 SR yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 mengakibatkan penurunan pertumbuhan pelanggan tahun 2021 sebesar 4,53%

dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,18% turun sebesar 5,65%. Penurunan pelanggan ini disebabkan karena masyarakat yang mengungsi keluar wilayah Kabupaten Mamuju. Manajemen perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA TA 2021). Realisasi pendapatan operasi tahun 2021 dibandingkan dengan anggarannya adalah Rp.18.202.956.742,00 atau 97,45%. Hal ini disebabkan adanya kapasitas produksi yang menganggur akibat jumlah pelanggan yang masih rendah, menurunnya volume produksi riil karena IPA mengalami kerusakan pasca gempa dan menurunnya pemakaian air domestik oleh pelanggan yang mengungsi pasca gempa. (*PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, 2021*).

Hal tersebut dapat menyebabkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah dan biaya modal yang digunakan perusahaan semakin besar, jadi perusahaan dalam menyediakan pelayanannya kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan kerusakan yang terjadi dan hambatan yang dialami masyarakat untuk meningkatkan kualitas di bidang air bersih, meningkatkan laba serta juga dapat meningkatkan kualitas anggaran. Perusahaan harus senantiasa berusaha mencapai target anggaran yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil yang maksimal, maka kualitas anggaran perlu diperhatikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

“Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah refrensi dan wawasan bagi pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu akuntansi, sekaligus sebagai bahan informasi atau acuan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti di bidang ilmu pengetahuan ekonomi keuangan untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan alternatif bagi Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Mamuju yang dapat dipakai sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Mardiasmo, 2018).

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang

berbeda-beda. Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Anik. dkk, 2020).

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien (Mardiasmo, 2018).

2.1.2 Anggaran

Anggaran disuatu wilayah seperti biasanya digunakan dalam pemenuhan keperluan penduduk atau warga diwilayah tersebut yang sesuai. Anggaran pada suatu daerah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat memenuhi keperluan yang ada pada suatu wilayah. APBD dihasilkan melalui pemasukan yaitu pajak dan bukan pajak yang selanjutnya diberikan kembali tidak lain untuk masyarakat tetapi dengan wujud pelayanan kepada warga

antara lain layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan keperluan yang lain. Dengan adanya APBN/APBD dapat menjadi pertanggungjawaban pemerintah atau sektor publik kepada warganya.

Pendapat yang dikemukakan menurut Halim dan Kusufi (2016) bahwa anggaran dinyatakan sebagai dokumentasi atau informasi yang di dalamnya terdapat perkiraan kinerja, baik dalam bentuk pemasukan ataupun pengeluaran, kemudian disediakan dengan skala keuangan atau finansial sehingga dapat dicapai pada masa tertentu dan melibatkan dokumen yang telah lalu dalam pengendalian dan pengukuran suatu kinerja. Suwandi (2015) menjelaskan pengertian dari anggaran daerah merupakan pengukur yang dapat digunakan dalam menetapkan masukan dan pengeluaran, dapat memberikan bantuan untuk menentukan hasil kesepakatan dan rencana pembangunan, kontrol pengeluaran, sumber pengembangan, tolak ukur dalam menilai kembali kinerja, digunakan dalam menggerakkan pegawai dan sebagai koordinasi untuk setiap kegiatan unit pekerjaan.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan anggaran daerah merupakan alat untuk memberi bantuan kepada perusahaan dalam perencanaan pembangunan pembuatan anggaran pada lembaga sektor publik, utamanya perusahaan daerah dengan proses yang tidak mudah dan memiliki faktor politis yang signifikan. Ini berbeda pada perusahaan swasta yang susunan anggarannya memiliki unsur politis relatif lebih kecil. Penyusunan anggaran harus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang hasilnya

sesuai harapan termasuk ketepatan tercapainya hasil dan keluaran. Keluaran dan hasilnya kemudian dimasukkan pada sasaran kinerja disetiap unit kinerja.

Bagi lembaga sektor publik salah satunya perusahaan daerah, anggaran bukan sekedar rencana setiap tahun tapi anggaran adalah suatu wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan biaya sektor publik yang diserahkan kepada organisasi tersebut. Dalam pengertian lain, dinilai bahwa anggaran sebagai rencana keuangan yang menjelaskan perencanaan organisasi dalam memberikan layanan kepada warga atau kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan daya tampung perusahaan dalam pelayanan, perkiraan jumlah dana pengeluaran demi terlaksananya rencana tersebut dan perkiraan sumber-sumber yang bisa menciptakan *output* serta seberapa besar *output* itu.

2.1.3 Fungsi Anggaran

Dalam membantu perusahaan untuk mengembangkan suatu daerah dapat menggunakan alat seperti anggaran sektor publik yang mempunyai manfaat utama sesuai penjelasan Nurkholis dan Moh Khusaini (2019) yaitu:

a. Anggaran digunakan untuk perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran pada sektor publik diciptakan untuk menyusun rencana strategi yang akan dilakukan organisasi sektor publik atau perusahaan daerah sesuai dana yang diperlukan dan hasil yang didapatkan dari belanja perusahaan daerah tersebut.

b. Anggaran digunakan untuk pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran adalah salah satu aspek yang dapat menyatukan suatu proses yang direncanakan dengan proses yang dikendalikan. Dalam pengendalian,

anggaran dapat menghasilkan rencana yang lengkap terhadap pemasukan dan pengeluaran perusahaan daerah sehingga belanja yang dilaksanakan bisa di pertanggungjawabkan untuk publik.

c. Anggaran digunakan untuk kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran dapat menjadi kebijakan fiskal pemerintah yang dimanfaatkan dalam memantapkan ekonomi dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

d. Anggaran digunakan untuk politik (*Politic Tool*)

Anggaran dapat digunakan dalam menghentikan prioritas dan keperluan finansial kepada prioritas tersebut.

e. Anggaran digunakan untuk koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran adalah suatu bentuk kesepakatan dari *budget holder* (eksklusif) kepada pemberi wewenang (*legislative*). Kinerja dari manager selanjutnya diukur sesuai dengan sasaran anggaran yang dicapai dan daya guna penyelenggaraan anggaran. Kinerja manager tersebut diukur sesuai dengan jumlah hasil yang diperoleh dan dihubungkan dengan anggaran yang sudah ditentukan. Anggaran adalah alat yang tepat dalam pengendalian dan pengukuran kinerja.

g. Anggaran digunakan untuk motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran juga digunakan sebagai alat motivasi pegawai, anggaran seharusnya memiliki sifat *challenge but attainable* atau *demanding but achievable*. Artinya adalah sasaran anggaran seharusnya tidak melambung tinggi agar dapat dicapai.

2.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018) ada beberapa macam dalam pembuatan anggaran. Setiap pendekatan anggaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yaitu:

1) Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional terdiri dari dua ciri yang utama antara lain metode penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan struktur susunan anggaran yang bersifat *line-item*.

a. Line Item Budgeting

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur *line-item* dilandasi alasan dengan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

b. Incremential Budgeting

Anggaran tradisional yang memiliki sifat *incremental* hanya menambah atau juga mengurangi jumlah rupiah terhadap unit yang telah ada sebelumnya dengan memakai dokumen pada tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar dalam menyesuaikan besarnya pengurangan atau tambahan tanpa harus

melakukan kajian mendalam.

c. New Public Management

New publik management lebih fokus terhadap manajemen pada sektor publik yang orientasinya pada kinerja dan tidak berorientasi pada kebijakan. Ada beberapa konsekuensi yang ditimbulkan bagi pemerintah salah satunya tuntutan dalam melakukan efisiensi, penangkasan biaya dan kompetensi tender.

d. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting)

Sistem anggaran kinerja adalah sistem yang meliputi program penyusunan dan tolak ukur kinerja dijadikan instrumen dalam mewujudkan tujuan dan target kegiatan. Sistem anggaran kinerja yang diterapkan dalam menyusun anggaran dimulai dengan merumuskan kegiatan dan menyusun struktur organisasi perusahaan daerah atau pemerintah sesuai programnya.

e. Zero Based Budgeting (ZBB)

Penyusunan anggaran yang memakai konsep *zero based budgeting* bisa membersihkan *incrementalization* dan *line-item* disebabkan anggaran yang diasumsikan dengan nol (*zero-based*), anggaran tahun lalu bukan sebagai patokan untuk menyusun anggaran tahun ini tetapi dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Oleh sebab itu, ZBB seakan-akan anggarannya diproses dari hal-hal yang baru.

f. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan cara menyusun anggaran dengan berdasarkan teori sistem yang orientasinya pada *output* dan tujuan pendekatan utamanya yaitu alokasi sumber daya yang dengan berdasar pada analisis ekonomi.

2.1.5 Anggaran Berbasis Kinerja

Mahmudi (2016) mendefinisikan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran dengan melihat pada hubungan antara anggaran (*input*) dengan pengeluaran (*output*) dan hasilnya (*outcome*) sebagai harapan dari program dan aktivitas termasuk ketepatan dalam mencapai pengeluaran dan hasilnya. Sistem penyusunan anggaran dengan orientasi terhadap *output* organisasi sangat erat hubungannya dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Setiap biaya penganggaran yang dilakukan dalam setiap pelayanan publik harus diukur dengan indikator kinerjanya yang direpresentasikan dalam tolak ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran berbasis kinerja di dalamnya mempunyai prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang harus diperhatikan supaya pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Ada beberapa prinsip yang dikemukakan Suheni (2019) yaitu:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai ujian, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program atau kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat.

b. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi di dalam pemberian pelayanan. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik untuk mencapai semua tujuan tersebut.

Ruang lingkup didalam penganggaran berbasis kinerja yaitu:

- 1) Menentukan visi dan misi, tujuan, sasaran dan target.
- 2) Menentukan indikator kinerja.
- 3) Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program.
- 4) Analisis standar biaya.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

2.1.6 Karakteristik dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Mursyidi (2013) sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
- b. Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
- c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.

Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang anggarannya disusun berdasarkan pada perkiraan biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Menurut Gamar (2013) tujuan anggaran berbasis kinerja antara lain:

- a. Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (*input*) yang terbatas.
- b. Tujuan dan indikator kinerja yang jelas, yaitu mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan jangka panjang.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk

menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan optimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) bagi para pelaksana penganggaran.

2.1.7 Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Untuk mengukur anggaran berbasis kinerja digunakan item-item indikator anggaran berbasis kinerja yang di adopsi dari penelitian Gamar (2013):

- a. Analisis koreksi
- b. Konsistensi dengan implementasi
- c. Tingkat kejelasan dengan rencana strategi
- d. Rencana strategi
- e. System reward dan punishment
- f. Efektivitas pengawasan
- g. Peningkatan kualitas
- h. Manajemen perusahaan
- i. *Goal congruence* (keselarasan tujuan)

2.1.8 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran kinerja disusun sebagai dasar untuk menyempurnakan anggaran tradisional tidak akan terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. Menurut Halim & Kusufi (2016) terdapat kelebihan dan kekurangan dari anggaran berbasis kinerja yaitu :

- a. Kelebihan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah :
 - 1) Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja.
 - 2) Pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja.
 - 3) Menghindari pemborosan.
- b. Kekurangan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
 - 1) Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
 - 2) Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satu unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.
 - 3) Akun-akun dalam pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (*cash basis*).
 - 4) Kadang kala, aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.

2.1.9 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya. Bastian (2016) menyatakan, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugasnya kepada pihak pemberi amanah tersebut baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Akuntabilitas dapat diartikan ketika para pengambil keputusan di Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya dapat terlaksana secara efektif. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi: penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Agar akuntabilitas tersebut dapat diterapkan, harus memiliki prinsip. Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari suatu pengukuran kinerja. Hal ini dikarenakan tanpa ukuran kinerja, sebenarnya kita juga tidak tahu dimana kita berada dan apa yang telah dilaksanakan. Dengan pengukuran kinerja ini kita akan tahu apakah kita berhasil ataukah gagal.

Terdapat aspek atau dimensi akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan

otorisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara efisien dan efektif, akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Efisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kliennya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi yang hendaknya merupakan program bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa

kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, *stakeholder* mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Pelaporan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola dana publik.

2.1.10 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Ada beberapa item-item dari indikator akuntabilitas kinerja yaitu:

- a. Kelancaran suatu kegiatan
- b. Keterkaitan pencapaian kinerja
- c. Kejelasan sasaran dan tujuan
- d. Pernyataan
- e. Visi dan misi program
- f. Adanya pengukuran kinerja
- g. Analisis data kinerja
- h. Melakukan evaluasi kegiatan

- i. Laporan akhir
- j. Mengutamakan kepentingan program
- k. Melakukan pengecekan pada program

2.2 Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Berikut adalah beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

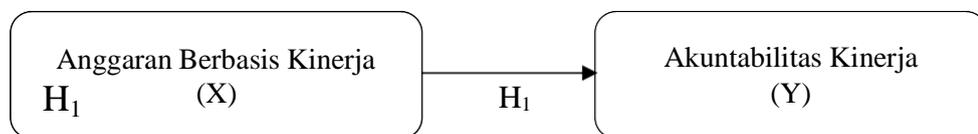
No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Sya' Roni/2019. <i>Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi</i>	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel perencanaan anggaran, implementasi/ pelaksanaan anggaran, pelaporan/ tanggung jawab anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Sama-sama meneliti variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja.	Uji normalitas pada penelitian Muhammad Sya' Roni menggunakan grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan uji normalitas penelitian ini menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov dan menggunakan analisis regresi linear sederhana.
2.	Nadira Hilmi Israr & Efrizal	Pengaruh Penerapan Anggaran	Penerapan anggaran berbasis kinerja	Sama-sama meneliti variabel	Penelitian Nadira Hilmi Israr & Efrizal

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Syofyan/ 2022. <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)</i>	Berbasis Kinerja Dan Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	dan penerapan <i>good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Padang.	bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variable terikat yaitu akuntabilitas kinerja.	Syofyan terdapat variabel <i>good governance</i> . Sedangkan penelitian ini tidak terdapat variabel <i>good governance</i> .
3.	Ferina Anggraeni & Suji Abdullah Saleh/2020. <i>Indonesia Accounting Research Journal</i>	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung).	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Sama-sama meneliti variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variable terikat yaitu akuntabilitas kinerja.	Teknik pengambilan sampel penelitian oleh Ferina Anggraeni & Suji Abdullah Saleh menggunakan purposive sampling. Sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin.
4.	Nur Desiana Wardani & Dewi Silvia/2021. <i>Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya</i>	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sama-sama meneliti variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variable terikat yaitu akuntabilitas kinerja.	Penelitian oleh Nur Desiana Wardani & Dewi Silvia di LPMP Lampung terdapat variabel kejelasan sasaran anggaran dan menggunakan uji hipotesis simultan.

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung.	pada LPMP Lampung.		Sedangkan penelitian ini tidak terdapat variabel kejelasan sasaran anggaran dan tidak menggunakan uji hipotesis simultan.
5.	Rina Asmeri, Delvianti & Ramadani/ 2022. <i>Pareso Journal</i>	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada PT.Pertamina Retail SPBU Coco Mata Air Padang Tahun 2020	Anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.	Sama-sama meneliti variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja.	Lokasi Penelitian Rina Asmeri, Delvianti & Ramadani di PT.Pertamina Retail SPBU Coco Mata Air Padang Tahun 2020, terdapat variabel sistem pelaporan keuangan. Sedangkan lokasi penelitian ini di PDAM Mamuju dan tidak terdapat variabel sistem pelaporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual terdapat variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja dan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

- H₀ : Anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
- H₁ : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Maka dari itu, dengan adanya anggaran berbasis kinerja yang murni diharapkan dapat memberikan suatu pertanggungjawaban yang jelas atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Implementasi anggaran berbasis kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju hendaknya perlu dikembangkan kembali menjadi lebih baik seperti meningkatkan kualitas

anggaran dan mencapai target anggaran yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain contohnya pelanggan PDAM, dengan variabel-variabel lain contohnya variabel pengendalian akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja perusahaan daerah atau instansi dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.
- c. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek peneliti tidak hanya berfokus pada satu instansi saja seperti dalam penelitian ini. Namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa instansi agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja perusahaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. & Saleh, S.A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung). *Indonesia Accounting Research Journal*. Vol. 1(1).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2022). *Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2021*. Mamuju.
- Delvianti, R.A. & Ramadani. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada PT.Pertamina Retail SPBU Coco Mata Air Padang Tahun 2020. *Paareso Journal*. Vol. 4(4).
- Djayasinga, Marselina. (2015). *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Edisi II).
- Gamar, J.Y. (2013). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja* (studi kasus Pemerintah Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember. Universitas Jember.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. Abdul. & Kusufi, M.S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Israr, N.H. & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. Vol. 4(4).
- Jumingan. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Malang: UB Press.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miranti. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
- Nurkholis & Kusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Rakhmi, A.A (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. *Skripsi*.

- Rezekia, A.M. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)*. Skripsi.
- Roni, M.S. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8(8).
- Saputri, E.M., Kusuma, I.L. & Prastiwi, I.E. (2021). Pengaruh Pengukuran Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus PT. Indo Veneer Utama). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 22 (1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhaeni. (2019). *Utara, Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Toraja*. Skripsi.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahdatul, L., Rahayu, S & Dillak, V.J. (2016). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung*. *E-proceeding of Management*. Vol.3(2).
- Wardani, N.D. & Sivia, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 6(1).
- Yuesti, A., Sandrya, N.L.P & Pramesti, I.G.A.A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah aletheia.
- Sumber Lain:
- Mengenal dan Memahami Profile Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju*. Mamuju.
- MetroSulbar. (Januari, 2018). Profil PDAM Tirta Manakarra Mamuju kecil-kecil tapi untung?! | MetroSulbar. <http://metrosulbar.com>.
- Rahman, A. (31 Mei 2022). Alasan PDAM Manakarra Mamuju tak bisa distribusikan air secara serentak ke pelanggan. <https://sulbar.tibunews.com>.
- Susanto, H. & Umar, A.R. (21 Januari 2021). Jaringan PDAM Mamuju rusak akibat gempa, suplay air 8.000 pelanggan macet. <https://m.liputan6.com>.